

Implementasi Kebijakan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo Kabupaten Bojonegoro

Skripsi



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan

**Oleh :
Ghofurun Khafid
22220030**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Program Beasiswa 1 Desa
10 Sarjana di Desa Tanjungharjo Kabupaten Bojonegoro disusun oleh:

Nama : Ghofurun Khafid

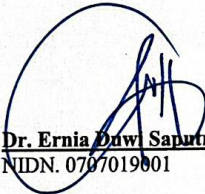
NIM : 22220030

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

untuk disetujui oleh dosen pembimbing skripsi dan diajukan ke tahap seminar
proposal skripsi

Bojonegoro, 30 Juli 2026

Pembimbing I,



Dr. Ernia Dwi Saputri, S.Pd., M.H.
NIDN. 0707019001

Pembimbing II,



Neneng Rika Jazilatul K., S.Pd., M.H.
NIDN. 0719048901

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo Kabupaten Bojonegoro disusun oleh:

Nama : Ghofurun Khafid

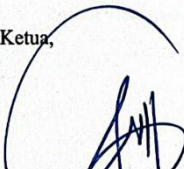
NIM : 22220030

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

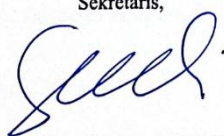
Telah dipertahankan dalam sidang skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026

Bojonegoro, 30 Juli 2026

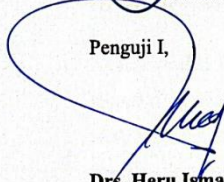
Ketua,


Dr. Erniz Duwi Saputri, S.Pd., M.H.
NIDN. 0707019001

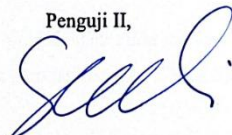
Sekretaris,


Sely Ayu Lestari, M.Pd.
NIDN. 0731039701

Penguji I,


Drs. Heru Ismava, M.H.
NIDN. 0709126502

Penguji II,


Sely Ayu Lestari, M.Pd.
NIDN. 0731039701

Rektor,

Dr. Dra. Junarti, M.Pd.
NIDN. 0014016501

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Pendidikan bukanlah hak yang bersyarat, melainkan janji konstitusi yang harus tunai bagi setiap anak bangsa."

(Terinspirasi dari amanat Pasal 31 UUD 1945)

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

(QS. Al-Mujadilah: 11)

"Proses yang melelahkan akan bermuara pada hasil yang membanggakan.
Teruslah berdampak, dimulai dari tanah kelahiran."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bakti, hormat, dan kasih sayang yang tak terhingga kepada:

Ayahanda dan Ibunda, pahlawan hidup saya, yang dengan cinta kasihnya selalu mendukung setiap impian saya untuk meraih derajat sarjana. Keberhasilan ini adalah milik kita bersama.

Bapak/Ibu Dosen PPKn IKIP PGRI Bojonegoro, terima kasih atas bimbingan dan teladan yang telah diberikan selama masa studi saya.

Para Informan Penelitian di Desa Tanjungharjo dan Pemkab Bojonegoro, terima kasih atas keterbukaan dan kerja samanya dalam membantu pengumpulan data penelitian ini.

Diriku Sendiri (Ghofurun Khafid), terima kasih karena telah bertahan, tidak menyerah pada rasa lelah, dan berjuang melampaui batas kemampuan hingga berhasil menuntaskan amanah akademis ini.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghofurun Khafid

NIM : 22220030

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Demi menjunjung tinggi integritas akademik, dengan tulus dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**(Implementasi Kebijakan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa
Tanjungharjo Kabupaten Bojonegoro)**

merupakan hasil karya asli saya sendiri dan semua sumber informasi yang digunakan telah saya cantumkan dengan jelas dalam daftar referensi berdasarkan kode etik ilmiah. Saya menyadari bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan terkait dengan keaslian karya ini, saya secara pribadi bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap menanggung sanksi hukum.

Bojonegoro, 15 Juli 2026



Ghofurun Khafid
22220030

ABSTRAK

Khafid, Ghofurun. (2026). “Implementasi Kebijakan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. IKIP PGRI Bojonegoro. Pembimbing I: Dr. Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H. Pembimbing II: Neneng Rika Jazilatul Kholisah, S.Pd., M.H.

Kata Kunci: Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana, hak pendidikan, implementasi kebijakan, Desa Tanjungharjo, Bojonegoro.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 31 UUD NRI 1945, namun akses pendidikan tinggi di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan ekonomi dan geografis. Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu upaya afirmatif untuk memenuhi hak atas pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan program tersebut di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo? dan (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, penerima beasiswa, dan orang tua, serta didukung observasi lapangan dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif Desa Tanjungharjo berhasil memenuhi kuota dengan 8 penerima pada Tahap 2A Tahun Anggaran 2025. Namun, terdapat kesenjangan implementasi yang cukup lebar. Mayoritas penerima berasal dari program studi keguruan, tetapi jumlah yang aktif melanjutkan studi secara berkelanjutan masih terbatas. Faktor pendukung utama adalah peran aktif pemerintah desa dan dukungan keluarga, sementara faktor penghambat meliputi prosedur administrasi yang rumit, sosialisasi yang belum merata, koordinasi antarlembaga yang lemah, serta bantuan yang hanya mencakup biaya UKT tanpa komponen biaya hidup.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun program memiliki semangat mulia dalam mewujudkan hak konstitusional atas pendidikan, efektivitasnya masih suboptimal. Diperlukan penyederhanaan birokrasi, perluasan manfaat, dan penguatan mekanisme monitoring agar program dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pemerataan pendidikan di pedesaan.

ABSTRACT

Khafid, Ghofurun. (2026). "Implementasi Kebijakan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo Kabupaten Bojonegoro". Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. IKIP PGRI Bojonegoro. Pembimbing I: Dr. Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H. Pembimbing II: Neneng Rika Jazilatul Kholisah, S.Pd., M.H.

Keywords: *One Village Ten Undergraduates Scholarship, right to education, policy implementation, Tanjungharjo Village, Bojonegoro.*

Education is a fundamental human right guaranteed by Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, access to higher education in rural areas remains hindered by various obstacles, particularly economic limitations and geographical factors. The "One Village, Ten Undergraduates Scholarship Program" initiated by the Bojonegoro Regency Government represents an affirmative policy aimed at fulfilling the right to education and improving the quality of human resources at the village level. This study analyzes the implementation of the program in Tanjungharjo Village, Kapas Subdistrict, Bojonegoro Regency.

The research problems are formulated as follows: (1) How is the implementation of the One Village Ten Undergraduates Scholarship Program in Tanjungharjo Village? and (2) What are the supporting and inhibiting factors in its implementation?

This study employs a juridical-empirical approach with a qualitative research design. Data were collected through in-depth interviews with village officials, scholarship recipients, and their parents, supplemented by field observations and document analysis. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model.

The findings indicate that administratively, Tanjungharjo Village successfully met the quota with 8 recipients in Phase 2A of the 2025 fiscal year. However, there is a significant implementation gap. Most recipients are enrolled in teacher education programs, yet the number of actively continuing students remains limited. The main supporting factors are the active role of the village government and strong family support, while the dominant inhibiting factors include complex administrative procedures, inadequate socialization, weak inter-agency coordination, and scholarship benefits limited to tuition fees (UKT) without living cost support.

This study concludes that although the program has a noble objective in realizing the constitutional right to education, its effectiveness is still suboptimal. Substantial improvements in bureaucratic simplification, benefit expansion, and

monitoring mechanisms are urgently needed to achieve meaningful equity in higher education access for rural communities.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik umat manusia.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo Kabupaten Bojonegoro” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Dr. Dra. Junarti, M.Pd.**, selaku Rektor IKIP PGRI Bojonegoro beserta jajarannya;
2. **Dr. Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H** selaku Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga;
3. **Neneng Rika Jazilatul Kholisah, S.Pd., M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan koreksi demi kesempurnaan penelitian ini;
4. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu dan wawasan;
5. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Desa Tanjungharjo yang telah memberikan izin dan akses data penelitian;
6. Seluruh informan, mahasiswa penerima beasiswa, orang tua, serta perangkat desa yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini;

7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan moral dan material;
8. Teman-teman seperjuangan angkatan yang telah memberikan semangat dan bantuan selama proses penyusunan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan pendidikan daerah, serta menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan efektivitas Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa.

Bojonegoro, 10 Juli 2026

Penulis

Ghofurun Khafid

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	I
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, DAN KERANGKA BERPIKIR	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Teoretis	14
C. Kerangka Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26

A. Pendekatan Penelitian	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian	27
C. Data dan Sumber Data Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	32
F. Teknik Validasi Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Deskripsi Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana	37
2. Data Penerima Beasiswa	40
3. Data temuan.....	42
4. Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program.....	43
B. Pembahasan Hasil Penelitian	47
1. Pelaksanaan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Desa Tanjungharjo	49
2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo	51
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	59

LAMPIRAN	61
----------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dipandang sebagai hak asasi yang secara inheren dimiliki oleh setiap warga negara serta menjadi prasyarat utama dalam pengembangan kapasitas individu dan kemajuan nasional. Jaminan terhadap hak atas pendidikan diberikan legitimasi konstitusional tertinggi melalui Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa hak memperoleh pendidikan dimiliki oleh setiap warga negara. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan kewajiban negara untuk membiayai dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan tersebut dimaknai sebagai adanya kewajiban konstitusional yang dibebankan kepada negara untuk memastikan terselenggaranya layanan pendidikan yang layak, berkeadilan, dan nondiskriminatif bagi seluruh warga negara, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal, tanpa pembedaan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. (Palguna & Dwi Atmaja, 2023).

Selanjutnya, melalui Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara diberikan mandat konstitusional untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Amanat tersebut dimaknai bahwa pendidikan tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan hak dasar warga negara, melainkan juga ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan

nasional yang berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperkuat daya saing sumber daya manusia. (Pendidikan et al., 2022)

Sebagai penjabaran dari amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. UU Sisdiknas juga menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin pemerataan akses pendidikan, termasuk pada jenjang pendidikan tinggi, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Walaupun jaminan konstitusional terhadap hak atas pendidikan telah diatur secara tegas, realitas empiris menunjukkan bahwa pemerataan akses terhadap pendidikan tinggi belum sepenuhnya terwujud. Berbagai kendala masih dihadapi oleh masyarakat, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta belum optimalnya distribusi informasi mengenai peluang pendidikan. Kondisi tersebut secara nyata lebih dirasakan oleh masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal (Mari dkk, 2024).

Kondisi tersebut memberikan dampak langsung terhadap rendahnya tingkat partisipasi pendidikan tinggi, termasuk di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro,

capaian pendidikan masyarakat, terutama pada jenjang pendidikan tinggi, masih menunjukkan perlunya perhatian yang serius dari pemerintah daerah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2024). Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan tinggi tersebut diposisikan sebagai tantangan utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengingat pendidikan tinggi dipandang sebagai instrumen strategis dalam pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing daerah.

Sebagai daerah dengan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan, Kabupaten Bojonegoro dinilai memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat untuk mendorong pembangunan manusia (Kuncoro, 2018). Pada tahun anggaran 2025, APBD Kabupaten Bojonegoro tercatat mencapai sekitar Rp7,9 triliun, sehingga menempatkannya sebagai salah satu kabupaten dengan APBD terbesar di Provinsi Jawa Timur (BPS Bojonegoro, 2025). Namun demikian, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 berada pada angka 73,74, yang meskipun termasuk dalam kategori tinggi, menunjukkan bahwa besarnya APBD tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kualitas pembangunan manusia. IPM diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (BPS Bojonegoro, 2025). sehingga peningkatan IPM menuntut perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang terarah serta berkelanjutan pada ketiga dimensi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa. Program tersebut dirancang sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah untuk memperluas akses terhadap pendidikan tinggi bagi masyarakat desa, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi. Pada tahap awal implementasinya, program ini dikenal dengan sebutan Beasiswa Dua Sarjana Satu Desa dan diatur melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019. Seiring dengan perkembangan kebijakan serta hasil evaluasi pelaksanaan, regulasi yang mengatur program tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 33 Tahun 2020, Nomor 52 Tahun 2021 (Dinas Pendidikan Bojonegoro, 2023), hingga perubahan terakhir melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 yang masih berlaku hingga saat ini. Rangkaian perubahan regulasi tersebut dipandang sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan penyempurnaan kebijakan beasiswa agar dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Secara normatif, kebijakan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, karena berorientasi pada pemenuhan hak atas pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat pedesaan (Pendidikan et al., 2022). Melalui pemberian bantuan biaya pendidikan, program ini diharapkan mampu mengurangi hambatan finansial yang selama ini menjadi faktor dominan rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di wilayah pedesaan, sekaligus berfungsi sebagai instrumen pemerataan pembangunan sumber daya manusia di tingkat daerah.

Secara administratif, Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 28 kecamatan, 419 desa, dan 11 kelurahan, sehingga secara keseluruhan terdapat 430 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah. Salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah tersebut adalah Kecamatan Kapas, yang mencakup 21 desa. Di antara desa-desa yang berada di Kecamatan Kapas, Desa Tanjungharjo termasuk sebagai salah satu desa yang memperoleh manfaat dari Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana. Desa tersebut memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam, sehingga pelaksanaan program beasiswa di wilayah ini dipandang relevan untuk dikaji secara lebih mendalam guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan dukungan akses terhadap pendidikan tinggi. (Admin. 2024, 5 Maret).

Berdasarkan uraian tersebut, analisis yang mendalam terhadap pelaksanaan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo dinilai perlu untuk dilakukan. Kajian yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas program ini dalam pemenuhan hak atas pendidikan masih tergolong sangat terbatas. Sebagian besar laporan yang tersedia disusun secara normatif atau bersumber pada data pemerintah, sehingga belum sepenuhnya memadai untuk menilai sejauh mana program tersebut benar-benar menjangkau dan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, khususnya pada tingkat desa.

Selain itu, penelitian terdahulu jarang membahas pemerataan manfaat program antar desa atau kecamatan, padahal distribusi penerima beasiswa tidak selalu merata karena bergantung pada jumlah pendaftar yang memenuhi syarat serta hasil seleksi administrasi dan akademik. Dampak sosial program, seperti kontribusi

terhadap peningkatan kompetensi akademik, kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kesejahteraan masyarakat desa, juga belum dianalisis secara mendalam.

Dengan demikian, penelitian yang berfokus pada Desa Tanjungharjo sebagai studi kasus menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan: sejauh mana Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana mampu meningkatkan akses pendidikan tinggi, memenuhi hak pendidikan konstitusional, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Desa Tanjungharjo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo.
2. untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program beasiswa 1 desa 10 sarjana di desa tanjungharjo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum terkait pemenuhan hak atas pendidikan melalui kebijakan pemerintah daerah.
- b. Menjadi referensi akademis mengenai implementasi program beasiswa sebagai upaya peningkatan akses pendidikan tinggi di wilayah pedesaan.
- c. Menambah literatur ilmiah mengenai peran pemerintah daerah dalam mewujudkan amanat Pasal 31 UUD 1945.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam evaluasi dan peningkatan pelaksanaan program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa Tanjungharjo mengenai manfaat dan peluang dari program beasiswa.
- c. Menjadi rujukan bagi desa atau daerah lain dalam mengembangkan program serupa untuk memperluas akses pendidikan tinggi.
- d. Menjadi bahan pertimbangan bagi institusi pendidikan dalam kerja sama peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat desa.